BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Transaksi *E-Commerce* dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Kebijakan Fiskal sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa. Pengolahan data dilakukan menggunakan *SmartPLS* 4.0 dengan metode *non-probability sampling* dan melibatkan 110 responden yang merupakan pelaku UMKM yang telah melakukan transaksi melalui platform *e-commerce* dan membayar PPN, serta pengisian kuesioner ini diisi melalui *google form*. Dari hasil pengujian menggunakan *SmartPLS* 4.0, maka diperoleh bukti empiris sebagai berikut:

1. Transaksi *E-Commerce* berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai *path coefficient* sebesar $-0,209$ atau $-20,9\%$ dan *p-value* sebesar $0,022 < 0,05$. Artinya, meskipun Transaksi *E-Commerce* meningkat, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai justru menurun. *Tax Compliance Theory* menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pajak dalam ekosistem digital dapat menghambat penerimaan negara. Banyak pelaku usaha *e-commerce* yang tidak melaporkan transaksi mereka secara transparan atau bahkan memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari pajak. Dari perspektif *Optimal Taxation Theory*, struktur perpajakan yang tidak adaptif terhadap transaksi digital menyebabkan sistem pemungutan pajak kurang efektif, sehingga kontribusi *e-commerce* terhadap PPN menjadi lebih rendah.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai *path coefficient* sebesar $0,665$ atau $66,5\%$ dan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, semakin besar pula Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil ini sejalan dengan *Tax Compliance Theory* yang menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka

- penerimaan pajak akan meningkat. Selain itu, dalam perspektif *Optimal Taxation Theory*, sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil akan mendorong kepatuhan lebih tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan negara.
3. Kebijakan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,508 atau 50,8% dan *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$. Artinya, kebijakan fiskal yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan cara menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan adil. Hasil ini sejalan dengan *Tax Compliance Theory*, karena kebijakan fiskal yang efektif dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan pajak. Sementara itu, dalam *Optimal Taxation Theory*, kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dapat meminimalkan ketimpangan ekonomi, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
 4. Kebijakan fiskal tidak dapat memediasi hubungan antara Transaksi *E-Commerce* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena nilai *path coefficient* -0,417 atau -41,7% dan *p-value* sebesar $0,049 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa mediasi tidak terjadi. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan saat ini masih belum cukup efektif dalam menangani tantangan perpajakan di sektor digital. *Tax Compliance Theory* menjelaskan bahwa pengawasan dan regulasi yang lemah dalam transaksi digital menyebabkan kepatuhan pajak tetap rendah, meskipun ada kebijakan fiskal. Dalam *Optimal Taxation Theory*, sistem pajak yang tidak disesuaikan dengan karakteristik ekonomi digital dapat memicu penghindaran pajak, sehingga penerimaan PPN tidak optimal.
 5. Kebijakan fiskal dapat memediasi secara parsial hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,319 atau 31,9% dan *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$. Ini berarti bahwa meskipun kebijakan fiskal berperan dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak, faktor eksternal seperti kesadaran pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Dalam perspektif *Optimal Taxation Theory*, kebijakan fiskal

yang efektif, adil, dan adaptif dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi tetap perlu adanya reformasi lebih lanjut agar dampaknya lebih optimal.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan melihat pengaruh Transaksi *E-Commerce* dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Kebijakan Fiskal sebagai variabel mediasi. Berikut adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam *Tax Compliance Theory* dan *Optimal Taxation Theory*. *Tax Compliance Theory* menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam ekosistem *e-commerce*, termasuk aspek kepercayaan terhadap pemerintah dan transparansi perpajakan. Dari sisi *Optimal Taxation Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pajak yang tidak sesuai dengan karakteristik ekonomi digital dapat menurunkan efisiensi pemungutan pajak. Oleh karena itu, teori perpajakan optimal perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor teknologi, digitalisasi ekonomi, dan insentif perpajakan yang lebih efektif bagi pelaku usaha digital.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Pemerintah perlu mereformasi kebijakan perpajakan yang lebih relevan dengan perkembangan ekonomi digital agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor *e-commerce* dapat lebih optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pemantauan transaksi digital berbasis teknologi, memperjelas regulasi perpajakan digital, meningkatkan sosialisasi

dan edukasi perpajakan, serta memperkuat sistem sanksi dan insentif bagi pelaku usaha *e-commerce*.

b. Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*

Pelaku usaha *e-commerce* perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan agar dapat menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak dan mendukung keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan pajak digital secara transparan (seperti e-Faktur dan e-SPT), mengoptimalkan peran akuntan pajak atau konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta mendukung kebijakan fiskal pemerintah dengan aktif melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang ingin mengembangkan kajian terkait efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor digital. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan metode penelitian yang lebih luas, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed-method* untuk memahami lebih dalam motivasi dan kendala dalam kepatuhan pajak *e-commerce*; meneliti implementasi pajak digital di negara lain, guna mendapatkan *best practice* yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia; serta menganalisis dampak kebijakan pajak digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor *e-commerce*.

c. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Sebagai bagian dari sistem perpajakan, masyarakat dan wajib pajak memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak pertambahan nilai. Untuk itu, wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, menerapkan transparansi dalam transaksi digital seperti memastikan setiap pembelian barang atau jasa di *e-commerce* dikenakan PPN yang sesuai, serta menggunakan layanan konsultasi pajak untuk memahami regulasi pajak yang berlaku.